

Negara *Leviathan* dan Etika Perdamaian dalam Pandangan

Thomas Hobbes¹

Otto Gusti

Pengantar umum

Pada abad ke-17 terjadi perubahan radikal dalam sejarah filsafat politik. Revolusi konsep tentang dunia dan pandangan tentang manusia moderen berimbas pada konsep tentang filsafat politik. Pergeseran paradigma dan model-model baru refleksi dan legitimasi politik menjadi urgen.

Filsuf Anglosaxon, Thomas Hobbes (1588-1679), membaca fenomena ini dan memberi tanggapan dengan meletakkan fundamen baru filsafat politik. Dalam karyanya *De Cive* (1642) dan *Leviathan* (1651) Hobbes mengembangkan sebuah konsep filsafat yang individualistis. Filsafat ini berpijak pada program rasionalitas ekonomis yakni maksimalisasi profit. Filsafat politik Hobbes bertolak belakang dengan filsafat politik Aristoteles serta seluruh teori politik pada Abad Pertengahan. Dengan metode analitis dan konsep pengetahuan generatifnya Hobbes membersihkan aroma aristotelisme dari etika dan politik. Hukum kodrat Kristiani pun semakin menjauh dari disiplin filsafat.

Pemikiran Hobbes ini telah menjerumuskan Eropa ke dalam krisis tradisi yang mahadasyat. Salah satu akibatnya, filsafat praktis moderen terus mengambil jarak dari konsensus metafisis dengan pandangan kodrati yang bersifat teleologis. Di samping itu filsafat praktis moderen juga menghindari pendasaran teologis atas kebenaran etis. Filsafat menarik konsekuensi politis-praktis dari proses demitologisasi dan sekularisasi konsep tentang manusia dan dunia tradisional. Dalam proses ini filsafat politik Thomas Hobbes tampil sebagai sebuah figur penting yang memberikan kekuasaan dan otonomi kepada manusia moderen. Antropologi Hobbes mengisi kekosongan sistem pasca hancurnya konsep kodrat metafisis dan kematian Allah. Kini manusia menjadi basis segala cara berpikir dan bertindak, kriteria dasar segala ideologi dan legitimasi serta tujuan cita-cita kolektif dan individual.

¹ Artikel ini ditulis untuk buku “75 Tahun Prof. Dr. K. Bertens” yang akan diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Etika Universitas Atmajaya, Jakarta.

Karya Thomas Hobbes *Leviathan* merupakan sebuah karya besar dengan spektrum tematisasi yang mahaluas. Struktur karya ini sangat analitis dan metodologis. Dalam runtutan jalan pikiran yang ketat bagian-bagian deskripsi dan langkah-langkah argumentasi tersusun rapih ibarat susunan marmer membentuk sebuah bangunan teoretis. Fundamen bangunan tersebut adalah antropologi, sebab manusia merupakan unsur material dasar pembentuk negara.

Negara *Leviathan* dibangun dari, oleh dan untuk manusia. Agar sebuah negara berhasil dibutuhkan pengetahuan yang sempurna tentang materi dasarnya. Karena itu di awal karyanya Hobbes berbicara tentang syarat-syarat antropologis filsafat politik. Ia mendeskripsikan manusia, kemampuan teoretis dan karakternya, ketakutan dan keinginan serta fungsi akal budinya. Uraian ini memiliki tujuan filosofis yakni memberikan legitimasi atas keharusan mendirikan negara dan kekuasaan politis atas dasar kodrat manusia, relasi alamiah dan kebutuhan-kebutuhannya.

Vita, Karya dan Latar Belakang Historis Pemikiran

Thommas Hobbes lahir pada tanggal 5 April 1588 di Malmesbury, Inggris dan meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 1679.² Dalam *Vita carmine expressa* (1672) Hobbes menulis bahwa ibunya melahirkan anak kembar: dia sendiri dan ketakutan (*me metumque simul*).³ Thomas Hobbes dilahirkan dini karena ibunya takut akan armada angkatan laut Spanyol yang siap menggempur Inggris. Anekdote ini melukiskan bagaimana ketakutan selalu menyertai hidup dan karya Hobbes. Lantaran takut dikejar oleh parlemen Hobbes mengasingkan diri ke Prancis tahun 1640. Namun juga setelah pembaharuan monarki pada tahun 1660 Hobbes belum merasa aman. Setelah bencana penyakit sampar dan kebakaran menimpah Kota London, Hobbes digugat di depan pengadilan karena menyebarkan ateisme dan heresi. Sejak gugatan ini ia tak pernah lagi mendapat ijin menerbitkan karya-karyanya, kendati ia tak pernah dijatuhi hukuman. Hobbes begitu terkesan dengan “ketakutan” sehingga menjadikannya sebagai sifat dasar manusia. Tak ada yang lebih ditakuti manusia selain kematian yang ganas karena kekerasan.

²Bdk. Christine Chwaszcza, Thomas Hobbes, dalam: Hans Maier (Ed.), *Klassiker des politischen Denkens. Von Platon bis Hobbes (I)*, Verlag C.H. Beck: Muenchen 2001, hlm. 209

³Bdk. Ottmann, Henning, *Geschichte des politischen Denkens. Die Neuzeit: von Machiavelli bis zu den grossen Revolutionen*, Metzlersche Verlagsbuchhandlung: Stuttgart 2006, hlm. 267

Ayah Thomas Hobbes adalah seorang pendeta. Keadaan ekonomi keluarga Hobbes cukup baik sehingga dapat membiayai studinya. Hobbes belajar di Oxford pada tahun 1602-1608. Setelahnya ia bekerja pada Keluarga Cavendish. Keluarga kaya ini telah membiaya perjalanannya mengelilingi Eropa sebanyak tiga kali.

Pada tahun 1629 ia berada di Geneva dan mengalami sesuatu yang menarik untuk karier akademiknya. Di perpustakaan kota tersebut Hobbes membaca karya Euklid berjudul *Elementa*. Metode geometris Euklid mempengaruhi cara berpikir Hobbes dan ia menerapkannya dalam teori politik. Dalam tour yang keempat Hobbes berjumpa dan berkenalan dengan Galileo Galilei yang turut mempengaruhi konsepnya tentang ilmu pengetahuan dan metode.

Dari tahun 1640-1652 Hobbes berada dalam pengasingan di Prancis. Selama masa pembuangan ini ia menerbitkan salah satu karya pentingnya dalam bidang politik berjudul *De cive* (1641). Ada suatu masa dalam sejarah politik di mana *De cive* lebih diminati dan banyak dibaca ketimbang *Leviathan*.

Tahun 1646-1647 Hobbes pernah menjadi guru matematika *Prince of Wales* yang juga berada dalam pengasingan di Paris. Tahun 1651 karya terbesarnya berjudul *Leviathan* dipublikasikan.

Spektrum karya-karya Hobbes sangat luas dan mengagumkan. Mulai dari refleksi tentang persoalan-persoalan dasar filsafat, epistemologi, matematika, geometri dan fisika hingga karya seputar etika, filsafat politik dan analisa tentang perang saudara yang melanda Inggris pada waktu itu. Thommas Hobbes juga menerjemahkan Thukydides dan Hommer ke dalam bahasa Inggris.⁴

Sebagaimana Rene Descartes, Hobbes pun mengeritik dan malampaui filsafat skolastik yang mendominasi seluruh filsafat abad pertengahan dan awal zaman baru. Keduanya membangun argumentasi filosofis atas dasar akal budi manusia dan meninggalkan argumentasi autoritatif seperti pernah dikembangkan Platon, Aristoteles, Agustinus dan Thomas Aquinas.

Namun dibandingkan dengan Descartes, Thomas Hobbes masih jauh lebih radikal dalam berargumentasi dan membela otonomi filsafat berhadapan dengan teologi. Jika teori pengetahuan Descartes masih berpijak pada

⁴ Bdk. Christine Chwaszcza, op. cit., hlm. 210

eksistensi Allah sebagai dasar terakhir kepastian dan kebenaran, filsafat politik Hobbes boleh dipandang sebagai rancangan sistematis pertama konsep filsafat politik sekular. Prosedur argumentasi yang individualistis dan semata-mata berpijak pada akal budi murni manusia menghantar filsafat politik Hobbes meninggalkan aristotelianisme serta konsep tatanan politis kosmologis dan teologis abad pertengahan.

Konsep Antropologi Hobbes

Seperti halnya Aristoteles, pada tempat pertama Hobbes mendefinisikan manusia sebagai *Sprachwesen – zoon logon echon* – makhluk berbahasa.⁵ Namun pemahaman Aristoteles tentang *zoon logon echon* berbeda dari pemahaman Hobbes. Menurut Aristoteles, sebagai makhluk berbahasa manusia mengungkapkan dirinya dalam *komunikasi* dan *komunitas*. Dalam kaca mata Aristotelian, bahasa menggambarkan esensi manusia sebagai makhluk sosial.

Hobbes melihat dan mengakui urgensi bahasa dalam hidup sosial. Dalam *Leviathan* ia menulis bahwa tanpa bahasa „tak mungkin ada negara, masyarakat, kontrak dan perdamaian“.⁶ Namun fungsi bahasa pada tempat pertama dalam pandangan Hobbes bukan untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam filsafat politik Hobbes bahasa dipahami sebagai bahasa perintah (*Befehl*) dan ketaatan (*Gehorsam*). „Adalah prestasi dari bahasa bahwa kita dapat memberikan perintah dan memahami perintah,“ tulis Hobbes.⁷

Pengalaman perang antarkonfensi yang melanda Inggris dan Eropa pada saat itu turut membentuk pengertian Hobbes tentang bahasa. Keyakinannya akan fungsi bahasa yang menciptakan komunitas manusia serta memperlambat hubungan antarmanusia dan antarbudaya sirnah seketika tatkala menyaksikan peristiwa kekerasan yang mendera masyarakat Eropa. Perang antarkonfensi dapat dibaca sebagai perang kata atau bahasa. Perang yang berakar pada perbedaan penafsiran kata-kata dalam kitab suci. Bahasa dapat

⁵ Bdk. Henning Ottmann, *op. cit.*, hlm. 281

⁶ Thomas Hobbes, *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines Kirchlichen und buergerlichen Staates*, Iring Fischer (ed.), terj. Walter Euchner, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984, hlm. 24 (bab 4)

⁷ Dikutip dari Ottmann Henning, *op.cit.*, hlm. 281

mempersatukan manusia, tapi juga memecah belahnya. „Lida manusia adalah alaram perang dan sekaligus trompet provokasi.“⁸

Menurut Hobbes kata-kata juga sudah kehilangan artinya yang dapat dipegang. Arti kata baik dan jahat tidak lagi dimengerti dalam hubungan dengan substansi sebuah objek.⁹ Jika tidak ada negara, maka dipercayakan kepada setiap individu untuk memberikan arti terhadap sebuah kata. Di mana ada negara, maka kewenangan negaralah yang mendefinisikan arti sebuah kata. Dalam pandangan ini kita melihat eratnya hubungan antara nominalisme dan desisionisme dalam filsafat Thommas Hobbes. Bahasa adalah basis material kekuasaan, baik kekuasaan individual maupun institusi. Bahasa direduksi menjadi konvensi dan telah kehilangan maknanya sebagai cerminan sebuah kebudayaan yang hidup dan objektif.

Hobbes juga mengikuti pengertian tradisional tentang manusia sebagai makhluk rasional. Namun pemahaman Hobbes tentang rasionalitas atau akal budi sudah bergeser. Rasionalitas adalah *menghitung*, *kalkulasi* atau apa yang dalam idealisme Jerman dikenal dengan *Verstand* (pengertian) dan bukan *Vernunft* (akal budi). Rasionalitas dalam pemahaman Hobbes telah kehilangan aspek *phronesis* yang dalam filsafat Aristoteles berarti keutamaan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan praktis (etis). Aspek rasionalitas seperti daya penilaian (*Urteilkraft*) dan fantasi dalam filsafat Hobbes direduksi menjadi nafsu untuk meraih kekuasaan.

Hobbes juga menekankan dimensi ketubuhan manusia. Manusia adalah objek kajian fisika. Ia tidak lebih dari sebuah tubuh di antara onggokan tubuh-tubuh yang lain. Manusia adalah tubuh yang bergerak. Motor penggerak tubuh adalah jantung. Hidup ditunjukkan lewat denyutan jantung. Tak ada yang lebih ditakuti selain jantung berhenti berdenyut. Sebab, itu berarti kematian.

Jantung dan peredaran darah menurut Hobbes menjelaskan adanya pengenalan inderawi, semangat dan nafsu. Fantasi muncul sebagai akibat kerja sama antara kesan yang ditimbulkan oleh objek dan reaksi yang ditimbulkan oleh tekanan peredaran darah.

Perasaan semangat dan rasa malas muncul karena kesan atau tekanan yang ditimbulkan oleh objek. Kedua perasaan ini muncul sangat bergantung

⁸ Thomas Hobbes, *Vom Menschen. Vom Buerger*, Guenter Gawlick (Ed.), Hamburg 1966, V, 5

⁹ Bdk. Thomas Hobbe, *Leviathan*, op.cit., hlm. 39 dst. (bab 6)

pada apakah denyutan jantung dihalang-halangi atau didukung. Jika dihalangi, akan muncul rasa sakit. Sebaliknya kalau dibiarkan bergerak normal, maka akan muncul rasa semangat. Cuma pertanyaan untuk Hobbes, apakah kita jatuh cinta karena jantung berdenyut lebih cepat atau sebaliknya karena kita jatuh cinta maka denyutan jantung berdebar-debar. Dengan teori seperti ini Hobbes juga tidak dapat menjelaskan bahwa jantung tiba-tiba berhenti berdenyut karena terkejut atau takut.

Dalam kaca mata antropologi Hobbes, manusia juga dikuasai oleh nafsu-nafsu biologis.¹⁰ Nafsu yang dominan adalah kecenderungan untuk *bertahan hidup* dan untuk *berkuasa*. Siapa yang mau hidup aman dan bertahan hidup, hanya membutuhkan satu hal: *kekuasaan*. Kekuasaan adalah kemampuan untuk menciptakan sarana untuk bertahan hidup dan hidup senang. Kekuasaan merupakan dorongan umum kemanusiaan. Semua manusia mengejar kuasa, obsesi akan kekuasaan berlangsung tanpa sisa, tanpa henti dan tidak pernah terpuaskan. Nafsu untuk berkuasa akan berhenti ketika masuk ke liang kubur.

Karena hidup manusia didominasi oleh kecenderungan-kecenderungan biologis, maka antropologi Hobbes tidak mengenal kehendak bebas. Hobbes mendefinisikan kebebasan sebagai „*die Abwesenheit aeusserer Hindernissa*“ – „keadaan di mana tidak ada halangan-halangan eksternal“.¹¹ Kebebasan berarti tak ada yang menghalangi gerakan tubuh. Jelas ini bukan pengertian yang benar tentang konsep kebebasan manusia, melainkan cara melukiskan gerakan tubuh biologis atau alamiah. Air misalnya mengalir bebas kalau tidak ada benda yang menghalanginya, atau sebuah batu bergulir bebas dari puncak bukit menuju lembah kalau tidak ada batang-batang pohon yang menghalangi. Namun jika seorang pendaki gunung berguling dari puncak gunung, kita tidak dapat katakan dia sedang menghayati „kebebasannya“.¹²

Kebebasan dalam memutuskan untuk melakukan sesuatu atau tidak, menurut Hobbes bukan konsep kebebasan yang dapat dipertentangkan dengan determinisme. „Saya mau“, menurut Hobbes, dapat juga diterjemahkan menjadi „saya punya kecenderungan untuk“. Satu-satunya yang punya kemauan menurut Hobbes adalah objek. Jadi bukan saya mau minum bir, tapi bir yang mau diminum.

¹⁰ Bdk. *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 99 (bab 14)

¹² Bdk. Hinning Ottmann, *op.cit.*, hlm. 283

Antropologi Hobbes adalah sebuah kiamat untuk „manusia“. Karena Hobbes begitu terikat dan terobsesi dengan determinisme, maka pertanyaan yang harus diajukan: Bagaimana Hobbes masih dapat memberikan pendasarasan atas prinsip tanggung jawab dan kewajiban?

Kondisi Alamiah: *Bellum omnium contra omnes*

Konsep Hobbes tentang pendirian negara berawal dengan “kondisi alamiah”. Kondisi alamiah merupakan sebuah eksperimen teoretis. Kelinci percobaannya adalah manusia-manusia alamiah. Mereka ditempatkan dalam sebuah situasi *prasosial*, *pranegara* dan jauh dari pemahaman tentang moral, institusi dan undang-undang. Kondisi alamiah adalah kondisi yang lahir kalau negara hancur atau gagal (*failed state*). Berdasarkan situasi tersebut filsuf Thomas Hobbes merancang model hidup bersama yang mungkin dan pengalaman-pengalaman praktis yang dapat dibuat bersama.

Pertanyaan yang diajukan Hobbes di sini ialah, apakah kodrat manusia cukup mengandung sumber-sumber daya perekat sosial, entahkah manusia sanggup mengembangkan tatanan sosial yang damai, stabil dan melayani kepentingan setiap orang atas dasar perangkat kodrati yang dimilikinya?

Hobbes dan seluruh filsafat politik moderen menjawab pertanyaan ini secara negatif. Posisi Hobbes berbeda dengan pandangan para anarkis abad 19 dan 20. Kondisi alamiah merupakan sebuah kondisi “*bellum omnium contra omnes*” atau perang semua melawan semua. Mengapa situasi perang?

Salah satu alasan mendasar situasi perang semua melawan semua adalah *dinamika kekuasaan* yang menjadi karakter dasar hidup manusia. Nafsu manusia untuk meraih kekuasaan tak pernah berhenti. Tubuh tak pernah berhenti bergerak. Hanya tabrakan dengan tubuh-tubuh yang lain dapat memblokirnya untuk terus bergerak. Ketakberhinggaan obsesi kekuasaan menciptakan instabilitas dan perbenturan.

Alasan lainnya untuk berperang ialah adanya *kesamaan* antarmanusia. Dalam pandangan Hobbes, faktum bahwa semua manusia sama tidak menjadi landasan paham hak-hak asasi manusia seperti dalam teori politik moderen umumnya. Kesamaan antarmanusia menyebabkan kondisi *bellum omnium contra omnes*. Dinamika kekuasaan saja belum cukup untuk menyebabkan

perang. Sebab bisa saja yang satu lebih kuat daripada yang lainnya dan yang lebih kuat akan menguasai yang lemah. Argumen *egalitarianisme* menyempurnakan bahaya perang dari *dinamika kekuasaan*. Bukan persamaan kekuatan fisik dan kemampuan intelektual yang dimaksudkan. Substansi kesamaan terletak pada kemampuan untuk membunuh.¹³ Setiap orang dapat membunuh siapa saja. Yang lemah dapat membunuh yang lebih kuat. Pembunuhan terhadap tyran yang sering terjadi dalam sejarah politik merupakan bukti empiris tesis Hobbes ini.

Competition, diffidence, glory (persaingan, curiga, dan nafsu akan popularitas) merupakan alasan antropologis lain mengapa kondisi alamiah diwarnai konflik dan perang.¹⁴ Baiklah kita menguraikan secara teliti ketiga kondisi antropologis tersebut. *Pertama*, adanya *persaingan* karena terbatasnya jumlah barang kebutuhan. Persaingan kemudian berubah menjadi permusuhan. Hidup manusia berlangsung dalam dunia dengan keterbatasan *resources*. Baik barang-barang pemuas kebutuhan maupun sarana untuk memperolehnya di masa depan sangat terbatas. Karena itu manusia selalu akan bersaing satu sama lain. Mereka bersaing untuk memperoleh barang yang diinginkan dan juga berjuang untuk memperoleh kekuasaan. Dalam kondisi alamiah tak ada batas persaingan dan civilisasi konflik. Dalam kondisi alamiah hanya terdapat kesediaan menggunakan kekerasan, setiap konkurens dipandang sebagai musuh.

Kedua, dominasi rasionalitas *curiga* dan penggunaan kekerasan. Dalam kondisi alamiah kesediaan menggunakan kekerasan merupakan sikap rasional. Rasionalitas yang waspada harus mampu mengembangkan strategi-strategi preventif. Setiap orang harus memperhitungkan kemungkinan terburuk dan berpikir tentang cara menghadapi kekerasan orang lain. Maka kondisi alamiah merupakan sebuah situasi di mana yang mengajarkan individu rasional tentang strategi akumulasi kekuasaan dan cara berkompetisi. Setiap orang harus berusaha memperbesar sarana kekuasaannya dan merebut posisi kekuasaan.

Ketiga, egoisme dan naluri manusia untuk mengejar prestise. Biasanya dan dalam situasi-situasi batas manusia selalu menempatkan kemauan untuk hidup dan kesejahteraan pribadi di atas kepentingan orang lain. Dari kodratnya manusia tidak bersikap altruistis, tapi egoistis dan asoial.

¹³ Bdk. Thomas Hobbes, *Leviathan*, *op.cit.*, hlm. 94 (bab 13)

¹⁴ Bdk. *Ibid.*, hlm. 95

Karena alasan-alasan antropologis di atas maka hidup manusia kondisi alamiah menjadi “sepi, miskin, jijik, bestialis dan singkat”.¹⁵ Dari kondisi biologis ini, Hobbes menarik sebuah kesimpulan: “*exeundum esse e statu naturae*” – kondisi alamiah harus ditinggalkan.

„*Homo homini lupus*“ – „manusia adalah serigala bagi sesamanya” merupakan salah satu ungkapan terkenal dari Hobbes.¹⁶ Rumusan ini sering disalahpahami dan ditafsirkan sebagai model pesimisme antropologis Hobbesian. Tafsiran seperti ini telah mengaburkan fungsi argumentatif logis konsep kondisi alamiah. Kondisi alamiah bukan nasib atau kecelakaan. Kekelaman kondisi alamiah merupakan sebuah konstruksi rasional dan bukan akibat dari kodrat biologis buas manusia, juga bukan ungkapan sebuah obsesi kekuasaan yang tak dapat dihancurkan.

Manusia adalah serigala bagi yang lain bukan berarti ia memiliki kodrat seekor serigala. Ungkapan ini hanya mau menunjukkan bahwa setiap individu rasional dalam kondisi alamiah harus mengembangkan strategi untuk bertahan hidup yakni selalu bersikap curiga dan kesediaan menggunakan kekerasan. Juga orang yang paling lemah lembut sekalipun agar dapat bertahan hidup harus belajar mencurigai dan menginvestasikan kemampuan untuk bersaing. Selama ia berpikir rasional ia akan mempelajari sikap tersebut.

Kekelaman keadaan alamiah lahir dari kontradiksi dasariah dan rasional teoretis berikut: takaran rasionalitas individual atau subjektif yang kuat akan menciptakan tingkatan irasionalitas tertinggi pula secara objektif atau kolektif.¹⁷ Jika dalam kondisi pranegara individu semakin konsekwen menempatkan rasionalitas instrumental untuk tujuan *survival*, maka keadaan perang kondisi alamiah nampak semakin jelas. Dengan demikian situasi bahaya untuk setiap orang semakin kuat dan kondisi hidup bersama pun kian irasional. Kondisi alamiah adalah sebuah perangkap kelicikan dan karena itu ia juga menjanjikan harapan. Sebab kelicikan yang telah menghantar manusia ke dalam perangkap juga akan membebaskannya. Andaikata saja bukan kodrat rasionalitas manusia yang bertanggung jawab atas situasi perang

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 96

¹⁶ Bdk. Henning Ottman, *op.cit.*, hlm. 287

¹⁷ Bdk. Wolfgang Kersting, *Thomas Hobbes zur Einfuehrung*, Hamburt 2005, hlm. 118

dalam kondisi alamiah, tapi kodrat keserigalaannya, maka konsep perdamaian Leviathan yang dirancang Hobbes sudah pasti gagal.¹⁸

Keadilan Alamiah, Kooperasi dan Negara

Makna dari keadaan alamiah Hobbesian dapat direkonstruksi menjadi proses belajar tiga tahap akal budi manusia. Pada tahap *pertama* terdapat rasionalitas kecurigaan yang bersifat ofensif. Rasionalitas ini tahu betul bahwa dalam kondisi alamiah manusia hanya bertahan hidup jika selalu siap perang. Tentu saja individu lewat pengalamannya mengetahui kalau strategi seperti ini akan mengubah kondisi alamiah menjadi *bellum omnium contra omnes*. Sebuah analisa sebab yang pertama ini menghantar rasionalitas kepada pemahaman bahwa kondisi perang hanya dapat diatasi jika setiap individu rela tunduk di bawah aturan-aturan yang membatasi kebebasan dan mengkoordinasi perilaku manusia. Atau jika politik *survival* individual diganti dengan politik jaminan perdamaian sosial.

Maka pada tahapan *kedua* rasionalitas merancang sebuah strategi kerja sama. Fokus perhatian di sini adalah sistem “keadilan alamiah” (*natürliche Gerechtigkeit*) yang mencakupi sederetan aturan.¹⁹ Hobbes mempresentasikan aturan kerja sama sosial dan menata konflik bebas kekerasan ini dalam busana hukum kodrat tradisional. Hobbes berbicara tentang hukum alamiah yang „tak berubah dan bersifat kekal“.²⁰ Setiap undang-undang atau hukum merupakan „perintah yang diwajibkan secara rasional atau aturan umum yang melarang manusia melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan hidupnya dan membiarkan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dapat menyelamatkan hidupnya“.²¹

Kita tentu saja tidak boleh merasa bingung dengan penggunaan bahasa hukum kodrat tradisional yang mewajibkan ini. Hobbes memberikan makna baru kepada term-term hukum kodrat tradisional. Jika hukum kodrat klasik mengungkapkan tatanan normatif yang bersifat kekal, objektif dan mewajibkan, pandangan Hobbes tentang hak dan kewajiban alamiah ditentukan oleh gambaran tentang interese pribadi yang bersifat rasional. Hobbes mereformasi konsep hukum kodrat tradisional yang memberi penekanan pada kewajiban menuju sebuah individualisme. Kini hukum kodrat

¹⁸ Bdk. Ibid.

¹⁹ Bdk. Thomas Hobbes, *Leviathan, op.cit.*, hlm. 99-122 (bab 14-15)

²⁰ Ibid., hlm. 121

²¹ Ibid., hlm. 99

berpijak pada hak-hak individual dan bukan kewajiban. Hukum dibebaskan dari moral. Hukum kodrat tradisional selalu mengumandangkan imperatif etis: bertindaklah adil, hiduplah sesuai dengan keutamaan-keutamaan moral!

Hobbes membalikkan semuanya itu dengan mengatakan: bertindaklah sekian sehingga Anda tetap bertahan hidup. Setiap orang punya hak untuk mempertahankan hidup dengan menggunakan segala cara dan sarana yang tersedia. Hukum kodrat kini berubah dari perintah menjadi ijinan atau dalam bahasa James Bond “*a license to kill*”. *Ius naturale* berarti kebebasan setiap individu untuk menggunakan kekuasaannya seturut kehendak pribadi untuk mempertahankan hidup.²²

Menurut Hobbes, akal budi mewajibkan setiap manusia untuk mempertahankan hidup dan menjauhi segala sesuatu yang membahayakan hidup. Manusia menjalankan tuntutan akal budi ini atas dasar kebutuhan kodrati untuk *survival*. Aturan-aturan perilaku yang mewujudkan tuntutan rasionalitas tersebut menyebutkan beberapa sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Tuntutan akal budi itu berupa aturan kelicikan atau kelihaihan yang tidak bersifat kategoris tapi dianjurkan untuk ditaati untuk dapat bertahan hidup: setiap orang tahu bahwa keadaan di mana aturan ini berlaku jauh lebih menguntungkan dan lebih baik dari posisi alamiah.

Prinsip dasar aturan yang merupakan produk dari kelihaihan dalam mengolah pengalaman kondisi alamiah adalah aturan perdamaian bersyarat: „Setiap orang mengusahakan perdamaian sejauh masih ada harapan untuk itu. Andaikata perdamaian tak dapat lagi diciptakan, ia boleh mengangkat senjata, menggunakan kekerasan atau berperang.“²³ Aturan ini hanya menarik konsekuensi umum dari situasi bahaya perang. Ia tidak menawarkan resep bagaimana cara menciptakan perdamaian yang dicita-citakan oleh semua.

Kewajiban kodrati (*lex naturalis*) kedua memberikan jawaban: “Setiap orang harus secara sukarela menanggalkan haknya atas semua (*ius omnium in omnia*), dengan syarat bahwa yang lain juga bersedia bekerja sama, sejauh hal itu dipandang penting demi menciptakan perdamaian serta tujuan *survival*; ia harus menciptakan ruang bebas untuk orang lain sebagaimana orang lain juga memungkinkan kebebasan untuknya.”²⁴ Aturan akal budi ini belajar dari

²² Bdk. Ibid.

²³ Ibid., hlm. 99

²⁴ Ibid., hlm. 100

analisa tentang kondisi perang semua melawan semua: Manusia tahu bahwa kebebasan individual tanpa batas yakni hak kodrati untuk berbuat atau mengambil apa saja merupakan akar terdalam setiap struktur konflik. Karena itu jelas dan masuk akal bahwa kondisi perang dalam posisi alamiah hanya akan berakhir dengan mengambil jarak dari *ius in omnia et ad omnes*. Tentu saja kondisi ini hanya dapat tercipta jika terdapat ketersalingan. Dengan demikian ketakseimbangan dan asimetri yang membahayakan perdamaian dapat dihindari.

Mengambil jarak dari hak atas dasar ketersalingan yang merupakan kewajiban kodrati setiap individu tidak sama dengan kontrak pendirian negara. Ini lebih merupakan tuntutan umum terhadap individu untuk bertindak kooperatif-rasional, membuat kontrak dan membatasi kebebasan kodrati atas dasar kesepakatan bersama. Hal ini berkaitan dengan pakta untuk tidak saling menyerang, kewajiban-kewajiban kontrak untuk saling menghormati hidup dan hak milik. Kewajiban kodrati individual merupakan inisiatif perdamaian pribadi untuk menciptakan pulau perdamaian atas dasar kontrak dalam posisi alamiah. Di balik kewajiban kodrati yang kedua ini terdapat model sebuah sosialisasi spontan lewat jaringan legitimasi dan kewajiban timbal balik atas dasar kontrak. Model sosialisasi atau pembentukan masyarakat ini tentu saja hanya dapat berhasil jika pembatasan kebebasan kodrati atas dasar kontrak dijalankan secara disiplin. Pelanggaran terhadap kontrak tidak pernah boleh terjadi dan kewajiban-kewajiban kontrak harus ditaati sebagai aturan bersama. Maka bunyi kewajiban kodrati *ketiga* menurut Hobbes: “*Abgeschlossene Vertraege sind zu halten*” – “Kontrak yang sudah dibuat harus ditaati (*pacta sunt servanda*).”²⁵

Pada tahap ketiga ini, akal budi harus melihat dan memahami, dengan pernyataan perintah perdamaian dan perumusan aturan-aturan kerja sama saja belum ada jaminan bahwa kewajiban kodrati tersebut akan dijalankan. Dengan kemampuan akal budi saja, kita tahu bahwa tak seorang pun mentaati kewajiban kodrati untuk perdamaian dan kerja sama sosial jika tak ada jaminan bahwa semua akan bersikap disiplin menjaga perdamaian dan bekerja sama. Atas dasar pengetahuan ini akal budi merumuskan tugas atau kewajiban untuk mengubah situasi sekian sehingga aturan akal budi ditaati oleh semua. Dengan demikian setiap individu tanpa risiko dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh akal budinya demi melindungi hidup dan meraih kebahagiaan pribadinya. Dan hal ini hanya dapat dijalankan tanpa risiko jika

²⁵ Ibid., hlm. 110 (bab 15)

terdapat sebuah instansi kekuasaan yang memaksa yang menjamin efektifitas pelaksanaan aturan-aturan akal budi serta realisasi semua kontrak yang dibuat.

Hobbes menulis: “Konsensus semata tanpa adanya sebuah instansi kekuasaan bersama yang mengarahkan setiap individu dengan cara menciptakan rasa takut akan hukuman, tidak cukup untuk menciptakan keamanan sebagai basis bagi terwujudnya keadilan kodrati.”²⁶ Kondisi *bellum omnium contra omnes* dalam masyarakat purba tak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan kontrak timbal-balik tanpa paksaan dari luar. “Kontrak tanpa pedang adalah omong kosong dan tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk memberikan keamanan minimum sekalipun untuk seorang manusia. Andaikata instansi kekuasaan tidak didirikan atau tidak cukup soveren, maka secara hukum setiap orang boleh membela diri berhadapan dengan manusia-manusia lain.”²⁷ Untuk mengakhiri kondisi alamiah yang penuh kekerasan manusia hanya memiliki satu jalan kontrak mendirikan sebuah instansi kekuasaan yang mampu membatasi kebebasan manusia serta mengikat manusia untuk mentaati kewajiban-kewajiban kodrati atas dasar ketakutan pada hukuman.²⁸

Kontrak, Pelimpahan Wewenang dan Kesatuan Politis

Instansi kekuasaan yang dilengkapi dengan kewenangan untuk memaksa itu bernama negara atau *Leviathan*. Tentang konstruksi *Leviathan* Hobbes menulis:

Jalan satu-satunya untuk mendirikan instansi kekuasaan umum yang sanggup melindungi manusia dari serangan asing dan bahaya saling menyerang dan dengan itu memberikan jaminan keamanan kepada manusia sehingga mereka dapat menghidupi dirinya dengan bekerja serta hidup dalam kepuasan, adalah dengan pelimpahan kekuasaan dan otoritas mereka kepada seorang manusia atau perkumpulan manusia yang dengan prinsip suara terbanyak dapat mereduksikan kehendak masing-masing kepada satu kehendak. Ini sama artinya dengan menentukan satu orang atau perkumpulan orang yang harus merepresentasikan semua yang lain. Artinya, setiap orang mengakui segala sesuatu yang dilakukan oleh yang empunya otoritas demi perdamaian umum dan keamanan bersama. Setiap orang juga

²⁶ Hobbes, *Vom Menschen. Vom Buerger*, *op.cit.*, hlm. 127

²⁷ Hobbes, *Leviathan*, *op.cit.*, hlm. 131 (bab 17)

²⁸ Bdk. *ibid.*

mengakui diri sebagai *causa prima* segala keputusan serta menempatkan kehendaknya di bawah kehendak sang penguasa otoritas. Ini lebih dari persetujuan atau konsensus: ini merupakan sebuah persekutuan riil dari semua dalam diri seorang pribadi yang lahir dari kontrak dengan setiap orang, seolah-olah setiap anggota mengatakan ini: *saya memberikan otoritas kepada seorang pribadi atau perkumpulan serta memberikan hakku kepadanya untuk memerintah saya, dengan syarat bahwa Anda juga menyerahkan hak Anda kepada pribadi atau perkumpulan tersebut*. Jika hal ini sudah terwujud, maka orang menamakan perkumpulan yang berubah menjadi seorang pribadi itu *negara* (*civitas*). Inilah esensi negara yang merupakan seorang pribadi, di dalamnya setiap orang menjadi *causa prima* tindakannya lewat kontrak satu sama lain. Tujuannya ialah agar negara menggunakan kekuatan dan sarana kolektif yang ada untuk menciptakan perdamaian bersama dan mempertahankan diri.²⁹

Hak atas semua kini diganti dengan hak untuk memerintah diri sendiri. Hak ini kemudian dalam kontrak diserahkan kepada pemegang kedaulatan.³⁰ Janji setiap individu untuk menanggalkan kedaulatannya masing-masing merupakan tanda kelahiran sang *Leviathan*. Proses penanggalan otonomi manusia secara sukarela menciptakan "*deus mortalis*" yang memiliki kuasa paling besar di bumi ini. Ia berpikir dan bertindak untuk semua manusia. Lewat pelimpahan wewenang atas dasar kontrak, perkumpulan orang berubah menjadi kesatuan politis yang dipersonifikasi oleh pemegang kedaulatan. Lewat aktus pelimpahan hak dan otorisasi, massa berubah menjadi unitas politis yang dijiwai oleh sang Soveren. Dalam kata pengantar buku *Leviathan*, Hobbes sendiri menyebut soverenitas sebagai "*kuenstliche Seele*" – roh atau jiwa buatan yang memberikan hidup dan ruang gerak kepada seluruh tubuh.³¹ Aktus otorisasi merupakan fiat dunia politik, pemberian roh terhadap tubuh politis.

Kehendak soveren memerintah dan menggerakkan tubuh politis sekian, seperti individu dalam kondisi alamiah atas dasar hak pengaturan diri memerintah tubuhnya sendiri serta menggerakkan tubuh untuk bertindak. Lewat aktus otorisasi, setiap anggota yang terlibat dalam kontrak menjadikan

²⁹ Ibid., hlm. 134-135 (bab 17)

³⁰ Bdk. Reinhard Brandt, "Rechtsverzicht und Herrschafts in Hobbes' Staatsvertraegen", dalam "*Philosophisches Jahrbuch* 88, 1980, hlm. 41-56

³¹ Hobbes, *Leviathan*, op.cit., hlm. 5

dirinya sebagai pemegang tanggung jawab moral dan juridis tindakan soveren. Kumpulan manusia hanya dapat menjadi sebuah kesatuan politis jika terdapat kesatuan kehendak yang sungguh. Dan kesatuan kehendak yang otentis hanya terjadi jika semua orang menghendaki hal yang sama atau jika apa yang dikehendaki oleh seorang pribadi diterima dan diakui sebagai kehendak semua. Thomas Hobbes dalam teori politiknya memilih model kedua. J.J. Rousseau di kemudian hari mengeritik pandangan Hobbes ini dan memilih kemungkinan pertama sebagai basis legitimasi keputusan politis.

Otorisasi membuat setiap elemen dari sebuah perkumpulan menjadi penanggungjawab tindakan pemegang soverenitas. Otorisasi menciptakan basis legitimasi bagi hubungan representasi identitas-absorptif yang secara plastis diungkapkan pada halaman judul *Leviathan: Rex est populus* – raja adalah rakyat.

Hak-hak Soverenitas dan Kewajiban Warga

Teori kontrak sosial Hobbes merupakan kontrak yang memberikan *pendasaran* atas kekuasaan dan bukannya *pembatasan* kekuasaan. Penyerahan hak atas semua, penanggalan kebebasan kodrati dan otorisasi serta penyerahan hak untuk memerintah diri merupakan pengosongan diri tanpa syarat yang tidak menyisahkan kebebasan dan hak untuk partai-partai yang mengadakan kontrak. Dalam sejarah teori kontrak sosial, konsep kontrak Hobbesian ini bersifat unik dan tak ada padanannya.³² Filsafat politik Hobbes menawarkan sebuah model unik *pendasaran* radikal-individualistis akan kekuasaan absolut, sebuah legitimasi absolutisme negara di mana individu secara bebas mengikatkan dirinya lewat kontrak.

Aktus otorisasi tidak menciptkan hubungan juridis langsung antara individu dan soveren. Substansi satu-satunya perjanjian antarpenghuni kondisi alamiah adalah otorisasi yang menciptakan soveren. Soveren dibebaskan dari segala ikatan juridis terhadap warganya. Paradoks teori kebebasan ini merupakan pusat dari absolutisme teori perjanjian Hobbes. Konsep soverenitas Hobbes memiliki kekuasaan mutlak dan dibebaskan dari segala ikatan hukum kendati soverenitas bukan berasal dari Allah, tapi lahir dari kehendak dan persetujuan manusia.

³² Bdk. Wolfgang Kersting, *Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags*, Darmstadt 2005

Pandangan hukum yang merupakan substansi soberenitas menurut Hobbes merupakan kesimpulan logis dari konsep perjanjian.³³ Soveren diwajibkan untuk menjaga substansi soberenitas tersebut dan tidak boleh mengurangi atau menyerahkannya kepada pihak lain. Alasannya ialah tujuan atau telos yang memberinya kekuasaan yang berdaulat yakni menjaga keamanan bangsa.³⁴ Jadi soberen bukan tanpa kewajiban: benar bahwa ia tidak terikat pada kewajiban perjanjian atau yang dibuatnya sendiri, namun ia terikat pada tujuan yang menjadi dasar mengapa soberenitas itu dibentuk. Hal ini dapat dinamakan kewajiban fungsional: negara adalah instrumen perdamaian, dan soberen diwajibkan memelihara dan menggunakan instrumen tersebut, yakni tidak merugikan negara serta menggunakan kekuasaannya untuk tujuan politik perdamaian.

Bawahan tidak dapat membatalkan perjanjian. Otorisasi juga tidak dapat ditarik kembali. Kekuasaan tak dapat diganggu gugat, dan kewajiban serta ketaatan warga bersifat absolut seperti kekuasaan soberen. Logika perjanjian menunjukkan bahwa bawahan tidak punya kewajiban terhadap soberen, namun menciptakan kewajiban antarbawahan sendiri. Ketaatan politis absolut yang lahir dari aktus otorisasi bukan ditujukan kepada soberen tapi kepada sesama warga.

Alasan mengapa soberen mengambil posisi eksternal dapat dijelaskan dengan pandangan Hobbes tentang syarat yang seharusnya (*necessary*) dan mencukupi (*sufficient*) untuk menjamin perdamaian dan argumentasi instansi terakhir: jika terjadi konflik antar pelaku perjanjian, siapa yang akan memutuskan perkara jika soberen tidak lagi berada pada posisi netral? Tanpa posisi netral soberen, konflik akan diputuskan dengan kekerasan yang berarti kembalinya kondisi alamiah. Maka soberenitas yang mendapat kewajiban lewat perjanjian tidak cocok untuk mengakhiri kondisi alamiah.

Seperti kemahakuasaan Allah, *deus mortalis*-nya Thomas Hobbes pun memiliki kekuasaan absolut dan dibebaskan dari segala kewajiban. Karena itu *Deus mortalis* bersifat infalibel. *He can do no wrong!* Alasannya, setiap bawahan merupakan aktor utama segala tindakan dan penilaian yang dibuat oleh soberen. Konsekwensi logisnya, soberen lewat tindakannya tidak mungkin

³³ Bdk. Thomas Hobbes, *Leviathan*, *op. cit.*, hlm. 142

³⁴ Bdk. *ibid.*, hlm. 255

dapat memperlakukan bawahannya secara tidak adil dan dengan demikian bawahan juga tidak dapat menuduh soveren berlaku tidak adil.³⁵

Selain penjelasan di atas, basis infalibilitas soveren juga dijelaskan dengan cara berikut: Soveren selalu bertindak dalam ruang bebas hukum. Ruang geraknya tidak dibatasi rambu-rambu normatif. Tugas soveren ialah menciptakan hubungan juridis lewat penetapan undang-undang. Dengan demikian baru undang-undang negara ciptaan soveren dapat mendefinisikan serta membuat distingsi yang jelas antara “adil“ atau „tidak adil“. *Auctoritas, non veritas facit legem*. Dan karena kekuasaan merupakan sumber legitimasi tertinggi, maka dari logika kontrak Hobbes tidak mungkin ada hukum atau undang-undang yang tidak adil.

Di sisi lain memang Hobbes mengakui adanya perbedaan antara penguasa yang baik dan buruk. Namun kriterianya bukan hukum, tapi kelicikan strategis dalam bermain dengan kekuasaan politis. Praktik kekuasaan soveren dipandang semakin baik jika ia semakin efisien memajukan program penegakan perdamaian seperti tercantum dalam aturan keadilan kodrati. Alur argumentasi ini menutup kemungkinan untuk menggugat dan melakukan proses hukum terhadap soveren. Segala keputusan menyangkut sarana untuk menjamin keamanan internal dan eksternal berada di tangan soveren. Ia juga punya kewenangan absolut untuk menentukan tingkat ancaman keamanan serta mendefinisikan siapa saja yang harus diperlakukan sebagai musuh negara.

Konstruksi Leviathan dan Etika Perdamaian Global

Konsep negara Leviathan Hobbes dibangun atas dasar cita-cita akan perdamaian bersama dengan mengakhiri kondisi alamiah yang diwarnai dengan *bellum omnium contra omnes*. Untuk menciptakan perdamaian bersama dan tujuan *survival* setiap individu secara sukarela menanggalkan *ius omnium in omnia*. Absolutisme kekuasaan Leviathan juga hanya dibenarkan sejauh ia sanggup menjamin perdamaian bersama tersebut.

Harus diakui bahwa pusat perhatian etika perdamaian Hobbes hanya tertuju pada konflik internal sebuah masyarakat atau negara. Sedangkan konflik *antarleviathan* atau dalam term kontemporer persoalan etika perdamaian global luput dari perhatiannya. Hobbes berpandangan bahwa tidak mungkin dibangun sebuah sistem perdamaian yang bertahan lama

³⁵ Bdk. *ibid.*, hlm. 139

dalam hubungan antarnegara. Hubungan antarnegara mengikuti logika kondisi alamiah. Artinya, setiap negara harus membangun akumulasi kekuasaan guna membela diri. Dalam pandangan Hobbes *the law of nations* dan *the law of nature* adalah dua hal yang sama. Berbeda dengan Kant, Hobbes tidak merancang sebuah perdamaian abadi antarbangsa. Tak ada kemungkinan yang realistis bahwa *Leviathan-Leviathan* akan tunduk di bawah sebuah kekuasaan negara global. Maka, pada tataran global yang berlaku adalah prinsip *si vis pacem para bellum*. Dalam kaca mata Hobbes, politik internasional dipahami sebagai antagonisme antara negara-negara yang berdaulat.

Namun pada saat yang sama Hobbes berusaha menghindari adanya sikap kultus terhadap peperangan. Pemujaan perang dapat mengembalikan kondisi alamiah serta membahayakan *survival* setiap individu. Hal ini dapat diterapkan pada tataran internasional. Tugas Leviathan untuk menjamin stabilitas keamanan dalam negeri berhubungan erat dengan masalah anarki internasional. Sebab konstruksi Leviathan tidak hanya bertujuan untuk mengatasi konflik internal, tapi juga melindungi setiap warga negara dari serangan musuh dari luar.³⁶ Stabilitas perdamaian dalam negeri merupakan *conditio sine qua non* untuk melindungi diri terhadap serangan dari luar. Dengan demikian Leviathan memiliki tugas ganda: stabilitas keamanan ke dalam dan tujuan bersama menghadapi musuh dari luar.³⁷

Tentu saja Hobbes tidak memandang remeh konflik dan peperangan yang terjadi antarnegara-bangsa. Namun mengingat kapasitas militer yang ada pada abad ke-17, perang saudara yang terjadi dalam sebuah negara memiliki daya hancur jauh lebih dasyat ketimbang perang antarnegara. Perang saudara tidak hanya merusak tatanan hidup bersama, tapi juga menghancurkan basis peradaban sebuah masyarakat yang terbentang dari bidang pertanian, perdagangan hingga ilmu pengetahuan dan seni. Karena itu situasi perang saudara lebih mendekati gambaran tentang *state of nature*. Dalam kondisi alamiah inilah hidup manusia menjadi „*solitary, poor, nasty, brutish, and short*“.³⁸ Meskipun kerugian tak dapat dihindari, dalam perang antarnegara kesatuan internal dalam sebuah negara tetap dijaga. Bahkan lebih dari itu, menurut Hobbes, dalam situasi perang antarnegara para bangsawan akan

³⁶ Bdk. Thomas Hobbes, *Leviathan, op.cit.*, hlm. 134

³⁷ Bdk. Hans Schelkshorn, Thomas Hobbes' Ethik des Friedens, dalam: Norbert Brieskorn dan Markus Riedenauer (Ed.), *Suche Frieden: Politische Ethik in der Fruehen Neuzeit III*, Stuttgart: Kohlhammer 2003, hlm. 247

³⁸ Thomas Hobbes, *Leviathan, op.cit.*, hlm. 96 (bab 13)

menuntut para pekerjanya untuk bekerja lebih rajin sehingga masalah kelaparan dan kemiskinan dapat diatasi.³⁹

Perkembangan teknologi militer, terutama bom nuklir, membuat perbandingan Hobbes antara perang saudara dan perang antarleviathan menjadi kedaluwarsa. Namun dari sudut metodologis pandangan Hobbes tetap relevan untuk tatanan perdamaian global.

Metode yang sama bahkan ditemukan padanannya dalam cita-cita perdamaian abadi Kant lewat republik global, perserikatan bangsa-bangsa (*Voelkerbund*) dan kosmopolitisme. Tentu harus diakui bahwa Hobbes tidak pernah berbicara tentang kosmopolitisme. Namun pandangan Hobbes tentang soberenitas juga dianut oleh Immanuel Kant. Hal ini terbukti bahwa Kant kendati berpegang teguh pada rasionalitas hukum serta ide tentang kosmopolitik, di sisi lain ia menolak hak pembangkangan warga (*civil disobedience*).⁴⁰ Sebab pengakuan akan *civil disobedience* akan melemahkan kekuasaan negara dan menyebabkan munculnya dualisme kekuasaan soberen. Itu sama artinya dengan kondisi alamiah tanpa hukum.⁴¹

Keseluruhan filsafat politik Kant kelihatannya menjadi goyah di sini. Kontrak tidak lebih dari sebuah ilusi. Kontrak hanyalah sebuah ide tentang rasionalitas hukum. Namun dalam kenyataannya yang menciptakan undang-undang adalah soberen, kendati undang-undang tersebut seolah-olah berasal dari rakyat. Seperti Hobbes, Kant juga berpikir yang sama tentang asal-usul negara. Kant ingin mereformasi absolutisme, tapi reformasi tanpa keterlibatan aktif rakyat, tanpa kontrak dan juga tanpa *civil disobedience*.⁴²

Untuk mengakhiri *the state of nature* pada tataran politik global dibutuhkan paradigma politik Hobbesian dengan memperkuat institusi politik global. Hingga saat ini tatanan global bersifat hirarkis dan masih jauh dari perwujudan prinsip egalitarianisme. Negara-negara industri maju memiliki kekuasaan politis lebih besar dari negara-negara miskin. Sistem hirarkis ini hanya dapat diakhiri lewat institusionalisasi kerja sama internasional seperti pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun PBB perlu direformasi secara radikal agar menjadi organisasi internasional yang

³⁹ Bdk. *ibid.*, hlm. 98

⁴⁰ Penjelasan tentang *civil disobedience* dapat dibaca dalam Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius 2009, hlm. 182 dst.

⁴¹ Bdk. Immanuel Kant, *Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil: Metaphysische Anfangsgruende der Rechtslehre*, Stuttgart: Reclam 2001 (1797), hlm. 174-175 (bab 49)

⁴² Bdk. *Ibid.*

demokratis. Demokratisasi sistem kekuasaan internasional mengurangi tingkat kekerasan baik dalam politik nasional maupun internasional. Tatahan internasional yang demokratis dapat menciptakan konsensus sosial sebagai basis stabilitas dalam pergaulan antarbangsa.⁴³

Eropa pasca 1989 merupakan contoh untuk masyarakat internasional bahwa demokrasi dan komunitas etis internasional merupakan basis etika dan politik perdamaian dalam pergaulan antarbangsa.⁴⁴ Konsensus nilai demokratis merupakan landasan bagi jaringan kontrak internasional kendati jaminan pelaksanaannya tidak didasarkan pada monopoli kekuasaan sebuah negara dunia (*Weltstaat*), tapi pada sanksi moral dan finansial. Betul bahwa negara-negara demokratis juga pernah berperang atas nama nasionalisme. Namun sekali lagi Eropa pasca 1989 menjadi contoh bahwa komunitas etis demokratis kolektif menjadi basis perdamaian sosial dan ini dapat menjadi model untuk tatahan masyarakat dunia di masa depan.

Daftar Rujukan

Ata Ujan, Andre. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009

Brandt, Reinhard. "Rechtsverzicht und Herrschafts in Hobbes' Staatsvertraegen", dalam " *Philosophisches Jahrbuch* 88, 1980, hlm. 41-56

Chwaszcza, Christine. Thomas Hobbes, dalam: Hans Maier (Ed.), *Klassiker des politischen Denkens. Von Platon bis Hobbes (I)*. Muenchen: Verlag C.H. Beck, 2001

⁴³ Bdk. Ernst-Otto Czempel, Die Realismusfalle des "realistischen" Paradigmas, dalam: Hans Kueng, Dieter Senghaas (Ed.), *FRIEDENSPOLITIK. Ethische Grundlagen internationaler Beziehungen*, Muenchen- Zuerich: Piper Verlag 2003, hlm. 141-142

⁴⁴ Bdk. Hans Schelkshorn, op.cit., hlm. 249

Czempiel, Ernst-Otto. Die Realismusfalle des "realistischen" Paradigmas, dalam: Hans Kueng, Dieter Senghaas (Ed.). *FRIEDENSPOLITIK. Ethische Grundlagen internationaler Beziehungen*. Muenchen- Zuerich: Piper Verlag, 2003

Henning, Ottmann. *Geschichte des politischen Denkens. Die Neuzeit: von Machiavelli bis zu den grossen Revolutionen*. Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung, 2006

Hobbes, Thomas, *Vom Menschen. Vom Buerger*. Guenter Gawlick (Ed.), Hamburg 1966,

----- . *Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines Kirchlichen und buergerlichen Staates*. Iring Fischer (ed.), terj. Walter Euchner, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984

Kant, Immanuel. *Die Metaphysik der Sitten. Erster Teil: Metaphysische Anfangsgruende der Rechtslehre*. Stuttgart: Reclam, 2001 (1797)

Kersting, Wolfgang. *Die politische Philosophie des Gesellschaftsvertrags*. Darmstadt, 2005

----- . *Thomas Hobbes zur Einfuehrung*. Hamburg, 2005

Schelkshorn, Hans. Thomas Hobbes' Ethik des Friedens, dalam: Norbert Brieskorn dan Markus Riedenauer (Ed.). *Suche Frieden: Politische Ethik in der Fruehen Neuzeit III*. Stuttgart: Kohlhammer, 2003

